

# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DALAM PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KOTA TANJUNGPINANG

Dimas Pratama Anugrah Ariyanto

NPP. 29.0312

*Asdaf Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau*

*Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*

Email: [dimaspratama1231@gmail.com](mailto:dimaspratama1231@gmail.com)

## ABSTRACT

This research entitled "EMPOWERMENT OF THE POOR IN THE NON-CASH FOOD ASSISTANCE PROGRAM IN TANJUNGPINANG CITY". **Problem Statement/Background (GAP):** The people of Tanjungpinang City have fulfilled their food needs through the BPNT Program. However, in reality it is still not fully fulfilled. **The purpose** of this study is to determine how the empowerment of the poor in the non-cash food assistance program and the factors that can hinder and efforts to overcome the obstacles. **The method** used in this study is descriptive method with qualitative approach. Data collection and information in this study using interview techniques, observation, and documentation. The data that has been collected is analyzed using data reduction techniques, data presentation, and decision making/verification. **Based on the results** of the research that has been done by the researcher, the conclusion obtained is empowerment through the approach of basic needs, namely non-cash food assistance in its implementation successfully meets three aspects in maintaining household strength, namely: a) social aspects, b) political aspects, and c) psychological aspects. With the fulfillment of the indicators of these three aspects, the community in this case the family of beneficiaries can be said to be empowered through the BPNT program. The inhibiting factors of the empowerment of the poor in the non-cash Food Assistance program are the many changes in the policy of the Ministry of Social Affairs and the still existence of mismatches in the data of the poor population in DTKS with beneficiaries, so there are efforts to overcome these obstacles, namely by increasing coordination between the social service with TKSK and beneficiary families and online complaints on the website of the Ministry of Social Affairs related to DTKS recipients of non-cash food assistance. **Conclusion:** The three indicators are aspects of household strength which is the goal of empowering the poor can be said to be successful in implementing empowerment through the Non-cash Food Assistance program (BPNT).

**Keywords:** Empowerment, Poverty, Social Assistance, Social Service

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DALAM PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KOTA TANJUNGPINANG". **Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Masyarakat Kota Tanjungpinang sudah terpenuhi kebutuhan pangannya melalui Program BPNT. Walaupun demikian, dalam kenyataannya masih belum sepenuhnya terpenuhi. **Tujuan** dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat miskin dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan faktor yang dapat menghambat serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode** yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data serta informasi di penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan/verifikasi. Berdasarkan **hasil** dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, kesimpulan yang diperoleh adalah pemberdayaan melalui pendekatan kebutuhan dasar yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam pelaksanaannya berhasil memenuhi tiga aspek dalam mempertahankan kekuatan rumah tangga, yaitu: a) Aspek Sosial, b) Aspek Politik, dan c) Aspek Psikologis. Dengan terpenuhinya indikator dari tiga aspek tersebut, masyarakat dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat dikatakan berdaya melalui program BPNT. Faktor penghambat dari pemberdayaan masyarakat miskin dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah banyaknya perubahan kebijakan dari Kementerian Sosial dan masih adanya ketidaksesuaian data penduduk miskin yang ada di DTKS dengan penerima manfaat, sehingga terdapat upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan peningkatan koordinasi antara Dinas Sosial dengan TKSK dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pengaduan online pada website Kementerian Sosial terkait DTKS penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). **Kesimpulan:** Ketiga indikator yaitu aspek-aspek dalam kekuatan rumah tangga yang merupakan tujuan pemberdayaan masyarakat miskin dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan pemberdayaan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

**Kata Kunci :** Pemberdayaan, Kemiskinan, Bantuan Sosial, Dinas Sosial

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Kebutuhan pangan dapat terpenuhi apabila negara atau masyarakat menciptakan ketersediaan, distribusi dan kemudahan akses memperoleh pangan (Nain, 2018: 85). Pangan adalah kebutuhan dasar yang ketika terjadi perkembangan populasi dan peningkatan kualitas kehidupan, permintaannya terus meningkat. Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Hak untuk memperoleh pangan termasuk dalam salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam memenuhi pangan masyarakat, perlunya diversifikasi konsumsi pangan. Hal ini dilakukan untuk mengontrol atau mengelola pola konsumsi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan. Pemerintah juga harus dapat mewujudkan ketahanan pangan demi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan seluruh rakyat akan pangan harus cukup, terjangkau, dan terdistribusi dengan baik. Dalam hal kewenangan, terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dalam mengurus pelayanan pangan. Dalam menangani urusan pemerintah daerah di bidang pangan, pemerintah daerah perlu memprioritaskan kepentingan dalam rangka untuk membagi kewenangan dengan pemerintah pusat. Pembagian kewenangan dalam bidang pangan dirancang untuk memastikan bahwa semua pelayanan di bidang pangan bisa mencapai semua bagian membutuhkan pelayanan, serta untuk mewujudkan organisasi ideal yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang stabil dan berkelanjutan, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat 3 (tiga) komponen utama yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan, yaitu: (1) ketersediaan makanan yang cukup dan terdistribusi; (2) keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; dan (3) asupan pangan beragam dan gizi seimbang. Untuk

mewujudkan tiga komponen utama tersebut, peran pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah adalah organisasi dengan kekuasaan administrasi pemerintahan, yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menurut Rasyid (2007:111) terdapat 4 (empat) fungsi pemerintah, yaitu pelayanan (Public Service), pembangunan (Development), pemberdayaan (Empowering), dan pengaturan (Regulation). Pemberdayaan yang dimaksud untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk memberdayakan dan melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai kemajuan bersama (Nain, 2017: 11). Tujuan pemberdayaan adalah agar masyarakat yang menghadapi masalah sosial dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk meningkatkan taraf hidupnya agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga tujuan utama pemberdayaan masyarakat yaitu masyarakat miskin. Menurut Gunawan dalam Hamid (2018: 10), pemberdayaan masyarakat, dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan semua potensi masyarakat untuk menghadapi faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Pada dasarnya, pemberdayaan adalah suatu rencana perubahan sosial yang bertujuan untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat memperoleh pembelajaran sehingga dapat bekerja secara mandiri untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, proses ini harus dilakukan secara bertahap, terus menerus dan berkesinambungan dengan partisipasi penuh dari masyarakat itu sendiri. Meskipun pemberdayaan bukanlah konsep ekonomi, namun seringkali dikaitkan dengan tujuan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penyelesaian atau cara mengatasi kemiskinan bukan hanya tentang peningkatan pendapatan, tetapi juga dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Pemberdayaan tidak terjadi dalam waktu singkat, tetapi dilakukan secara bertahap melalui proses untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Pengentasan kemiskinan, perubahan perilaku yang diawali dengan perubahan pola pikir individu dan masyarakat, hanya dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan pemberdayaan, masyarakat didukung untuk memperoleh keterampilan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya, sehingga berdaya saing dan mandiri. Sehingga, kualitas hidup dan kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan secara bertahap. Dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan, pada tahun 2017 pemerintah telah mengeluarkan program terbaru untuk mengatasi masalah yang ada melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diperuntukan untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) perbulannya melalui sistem kartu elektronik yang digunakan hanya di E-Warong dan pedagang bahan pangan yang melakukan kerja sama dengan Bank Himbara untuk membeli kebutuhan pangan. Capaian dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ialah untuk meminimalisir beban pengeluaran sekaligus memberikan kebutuhan pangan yang sesuai kepada KPM. Pemerintah pusat membentuk Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas secara terbuka distribusi bantuan sosial. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, berkualitas, dan andal. Maka dari itu, diperlukan beberapa faktor agar tujuan SPBE dapat terwujud.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berdasarkan uraian diatas, seharusnya masyarakat Kota Tanjungpinang sudah terpenuhi kebutuhan pangannya melalui Program BPNT. Walaupun demikian, dalam kenyataannya masih belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam pelaksanaan Program BPNT, dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa rumah tangga yang menerima bantuan dari tahun ke tahun semakin sedikit. Sedangkan, angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang yang terlihat pada Tabel 1.2 masih terjadi fluktuasi atau tenggelam muncul dan secara umum angka kemiskinan masih tinggi. Penulis melihat bahwa kemiskinan di Kota Tanjungpinang dianggap sebuah masalah yang perlu dikaji. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti secara cermat sesuai dengan program studi yaitu pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dengan judul “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DALAM PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KOTA TANJUNGPINANG”.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu Agus Wiyaka, Endang Murti (2018) Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perlindungan Sosial Di Kecamatan Gerih dan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2018, Anisa Rahma Dini, Yunisca Nurmalisa, Abdul Halim (2018) Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik, dan Diah Mukminatul Hasimi (2020) Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam . Dari 3 penelitian tersebut terdapat perbedaan. Adapun perbandingan terdapat pada metode dan teori yang digunakan, serta hasil dan fokus dari penelitian masing-masing.

## **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

- a) Penelitian Agus Wiyaka, Endang Murti (2018), berjudul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perlindungan Sosial Di Kecamatan Gerih dan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2018”. Adapun tujuan secara rinci dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan Implementasi Program BPNT dalam Perlindungan Sosial dan mengetahui Pelaksanaan Program BPNT dalam Perlindungan. Penelitian dilakukan menggunakan metode Participatory Action Research yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan dan Keluarga Penerima. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui BPNT sangat memberikan peluang usaha baru bagi pengusaha mikro dan menengah sehingga dapat mendorong pertumbuhan E-Warong KUBE yang dikelola oleh penerima BPNT yang pada akhirnya meningkatkan kemandirian masyarakat kurang mampu di pedesaan. Sebagian besar penerima menyatakan bahan pangan yang berupa beras dan telur yang diterima berkualitas dan pasokannya terjamin sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Karena BPNT termasuk berhasil dalam memperbaiki ketepatan dalam hal jumlah dan waktu penyaluran bantuan, pengurangan antrian, proses pencairan yang lebih cepat, serta pengurangan secara signifikan masalah teknis yang dihadapi dilapangan.
- b) Penelitian Anisa Rahma Dini, Yunisca Nurmalisa, Abdul Halim (2018), berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah uji validitas dan reliabilitas menggunakan angket, wawancara serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik berdasarkan persepsi

masyarakat penerima manfaat Program BPNT sudah berjalan efektif. Dengan persentase, ketepatan sasaran program 62% masuk ke dalam kategori efektif, sosialisasi program 44% termasuk ke dalam kategori cukup efektif, tujuan program 79% ada pada kategori efektif, dan pemantauan program 56% ada pada kategori cukup efektif. Untuk itu sehingga lebih ditingkatkan lagi efektivitas pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Gulak Galik dengan seringnya melakukan pembaharuan data penerima manfaat program serta pemberian pelayanan dan penginformasian program lebih maksimal.

- c) Penelitian Diah Mukminatul Hasimi (2020), berjudul “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif ekonomi islam. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Program BPNT di Desa Merak Batin ini belum terlaksana dengan baik, berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Bahwa Program BPNT di Desa Merak Batin ini hanya dapat memenuhi 3 indikator saja yaitu tepat jumlah, tepat harga, dan tepat kualitas. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Merak Batin ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, karena dari ketiga indikator kesejahteraan masyarakat yaitu kebutuhan dasar, tingkat kehidupan, dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial bagi individu dan bangsa belum ada yang terpenuhi.

### **1.5. Tujuan**

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat miskin dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Tanjungpinang
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pemberdayaan masyarakat miskin dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan pemberdayaan masyarakat miskin dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

## **II. METODE**

Untuk menjawab rumusan masalah saya menggunakan teori pemberdayaan masyarakat miskin yang meliputi aspek sosial, politik, dan psikologis. Tinjauan teoritis ini ditopang oleh tinjauan legalistik yang dimana tinjauan legalistik merupakan payung hukum yang mengatur tema penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif. Yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tema penelitian. Diantaranya adalah Berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai. Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti dilapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori parsons at.al maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan

dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar. Setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama analisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu data reduction, data display, conclusion drawing verification. Data reduksi adalah memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir conclusion drawing yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh kesimpulan akhir.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Tanjungpinang**

Kegiatan perekonomian yang berjalan dari hasil bantuan semata-mata untuk KPM dapat menjalankan kehidupan mereka sebagaimana mestinya. Dibalik itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat memberikan unsur pemberdayaan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemberdayaan adalah tujuan dan proses meningkatkan keberdayaan individu maupun kelompok melalui upaya pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan mengacu pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai melalui perubahan sosial yang lebih baik. Pendekatan pemberdayaan bertujuan untuk mengangkat masyarakat miskin keluar dari hambatan, ketidakberdayaan dan mendukung masyarakat miskin dalam kualitas hidup yang lebih baik melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Tanjungpinang. Dalam hal ini, peneliti membahas bagaimana pemberdayaan yang dilakukan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), peneliti melihat adanya unsur pemberdayaan dalam rumah tangga penerima bantuan, yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemberdayaan bersifat fleksibel, tidak ada suatu metode yang mengatur tentang pemberdayaan. Adanya pendekatan pemberdayaan yang menunjuk pada suatu konteks, dalam hal ini pemberdayaan yang peneliti amati adalah pemberdayaan yang berbasis kebutuhan dasar suatu rumah tangga Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini juga didukung dengan pernyataan Friedmann dalam Priyono, O. S. dan Pranarka, A. M. W. (1996) yaitu rumah tangga merupakan sumber utama suatu pemberdayaan. Dengan hal tersebut, berhasilnya suatu pemberdayaan dilihat dengan kekuatan rumah tangga tersebut yang terdiri dari tiga macam indikator, yaitu:

##### **3.1.1 Aspek Sosial**

Aspek sosial menilai suatu rumah tangga dalam hal ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat memenuhi akses terhadap dasar-dasar produksi tertentu dalam rumah tangga atau dalam arti dapat memenuhi kebutuhan pangan, khususnya makan dan minum dalam rumah tangganya dan juga partisipasi dalam organisasi sosial di lingkungan tempat tinggal para KPM. Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang utama dan harus dicapai dengan melaksanakan suatu usaha agar bisa mempertahankan dan memenuhi keberlangsungan hidupnya. Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Dinas Sosial telah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai salah satu bantuan kepada masyarakat miskin atau marjinal yang ada di Kota

Tanjungpinang dan untuk memberantas kemiskinan yang terjadi. Dari hasil penelitian, bantuan yang diterima dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah kebutuhan pangan yaitu beras, telur, sayur-sayuran, buah-buahan, ayam, daging, dan ikan. E-Warong yang merupakan penyedia serta tempat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyediakan apa yang KPM butuhkan. Umumnya di Kota Tanjungpinang, barang yang KPM butuhkan paling utama adalah beras, hal lain untuk melengkapi produksi lauk pauk rumah tangganya sangat jarang sehingga pengelola E-Warong selalu menyediakan banyak beras di setiap warungnya. Hasil Wawancara dengan Apriani selaku KPM pada tanggal 05 Januari 2022, mengatakan:

“Kadang bantuan dua ratus ribu itu KPM belikan beras semua. Untuk yang lain-lain jarang orang mau terutama kami harus berbelanja lagi kalau kebutuhan lain. Karena banyaknya orang mau ambil beras, distributor pun kami cari yang bisa hutang, soalnya BPNT ini kami harus transaksi dulu baru dapat uang sedangkan ada distributor yang maunya masuk barang langsung bayar.”

Dari pernyataan diatas, kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Tanjungpinang yang utama adalah beras. Wawancara yang saya lakukan dengan Ramila selaku KPM sekaligus pengelola E-Warong KUBE di Kecamatan Tanjungpinang Timur pada tanggal 14 Januari 2022 dan dengan Sri selaku KPM sekaligus pengelola E-Warong KUBE di Kecamatan Bukit Bestari pada tanggal 05 Januari 2022 yang merupakan kecamatan dengan jumlah KPM yang tinggi dengan hasil wawancara yang saya lakukan adalah KPM baik pengelola E-Warong KUBE dan lainnya merasa terbantu dengan bantuan yang mereka dapatkan dari BPNT, terutama dari pengeluaran mereka dan kadang mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan beras sampai akhir bulan kini dapat terpenuhi sehingga mereka sangat terbantu. Maka, dapat dikatakan bahwa salah satu aspek kekuatan rumah tangga yang merupakan tujuan pemberdayaan dapat dikatakan terpenuhi. Hal ini juga didukung dengan partisipasi masyarakat dengan organisasi sosial. Keadaan suatu pemukiman di Kota Tanjungpinang termasuk beragam, secara umum kehidupan bertetangga dan hubungan sosial masyarakat Kota Tanjungpinang masih terjaga. Tempat tinggal masyarakat miskin yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak terpisah dengan masyarakat yang mampu atau golongan menengah keatas. Walaupun seperti itu, tidak ada kesenjangan antara mereka. Tidak ada yang membedakan mereka miskin atau kaya dalam kehidupan bertetangga. Organisasi masyarakat yang ada di Kota Tanjungpinang umumnya berada di tiap kelurahan Kota Tanjungpinang. Wawancara yang dilakukan dengan Ramila selaku KPM Kecamatan Tanjungpinang Timur pada tanggal 14 Januari 2022, mengatakan:

“Karena kami tinggal tak berjarak kali jadinya masih terjaga hubungan antar kami. Untuk saat ini belum ada tingkah masyarakat yang membeda-bedakan gitu, jadi nyaman aja. Kalau tidak salah kami ada gotong royong di kelurahan kami beberapa kali sebulan. KPM juga ada ikut lembaga kelurahan gitu sama ada juga karang taruna.”

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Tanjungpinang tidak dibeda-bedakan dalam kehidupan bertetangga sehingga hubungan sosial mereka tetap terjaga dan mereka dapat aktif berpartisipasi dalam organisasi masyarakat. Sama halnya dengan hasil wawancara yang dikatakan oleh Sri selaku KPM Kecamatan Bukit Bestari pada tanggal 05 Januari 2022, yaitu:

“Kalau kami disini hidup Alhamdulillah tentram karena ramahlah orang daerah sini. Kalau untuk beda-beda gitu tak ada kami rasa. Malah kami juga saling bantu-bantulah paling bantu tenaga. Kalau KPM disini tuh kadang aktif juga ikut-ikut gotong royong macam gitu.”

Dari apa yang dikatakan oleh KPM tersebut, bahwa masyarakat khususnya KPM di Kota Tanjungpinang juga aktif dalam organisasi masyarakat dan tidak ada kesenjangan atau perbedaan diantara mereka dalam keikutsertaan dalam organisasi. Maka, aspek sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin ini termasuk berhasil dalam mewujudkan kekuatan rumah tangga.

### **3.1.2 Aspek Politik**

Aspek politik menilai setiap anggota keluarga dalam hal ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat berproses dalam membuat keputusan terutama keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri. Pengambilan keputusan tidak semata-mata diputuskan oleh kepala keluarga, tetapi kepada individu masing-masing yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Masa depan mengarah kepada arah tujuan kehidupan rumah tangga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut. Dalam penelitian yang saya lakukan, saya menemukan bahwa pemerintah melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memberikan jalur beasiswa kuliah bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki anak untuk melanjutkan pendidikan sarjana. KPM yang mendapatkan bantuan berupa kuliah gratis bagi anaknya di Kota Tanjungpinang adalah Iddha, penerima BPNT dan pengelola E-Warong Bestari Sejahtera bertempat di Kecamatan Bukit Bestari. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Marwan sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pada tanggal 05 Januari 2022, mengatakan:

“Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau kartu merah putih ini dapat digunakan KPM untuk sekolah anaknya seperti kuliah gratis dengan mendaftar secara online. Ibu Iddha ini contohnya, anaknya dapat kuliah secara gratis karena kartu merah putih ini dengan mengikuti program yang namanya Tim Kuliah.”

Dengan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), KPM berhak mendapatkan beasiswa untuk kuliah anaknya dengan beberapa tahap pendaftaran online dan juga seleksi. Hal ini merupakan kebijakan yang berguna untuk mereka dalam mengambil keputusan lebih lanjut terhadap masa depan mereka dan tentu saja dari kebijakan ini juga dapat membantu KPM dalam mengatur jumlah pengeluaran dalam melanjutkan keberlangsungan hidup mereka. Disamping itu dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mengambil keputusan terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga. Seperti yang dapat dipahami, KPM merupakan masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa beras, telur, sayur-sayuran, dan kebutuhan pangan lainnya. KPM tidak selamanya menerima bantuan ini, seiring perkembangan rumah tangga, keadaan mereka, dan beberapa kendala dari pemerintah bisa membuat mereka tidak dapat menerima bantuan. Maka, keputusan terhadap pengeluaran keuangan mereka setelah tidak menerima bantuan harus dapat ditentukan. Beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Tanjungpinang yang tidak menerima bantuan lagi karena alasan tertentu telah mengambil keputusan untuk menjalani kehidupannya seperti biasa. Wawancara yang dilakukan dengan Murni selaku KPM pada tanggal 14 Januari 2022, mengatakan:

“Orang yang sudah tak menerima BPNT ini biasanya karena dari pihak bank bilang mereka tidak dapat bantuan lagi pas gesek kartu di mesin jadinya mereka mau tidak mau siap aja. Karena tak dapat bantuan lagi, ya mereka harus belanja seperti biasa tidak pakai kartu lagi.”

Dari pernyataan tersebut, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memang harus siap dan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk kedepannya ketika tidak dapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lagi. Kekuatan rumah tangga KPM di Kota Tanjungpinang dalam mengambil keputusan



untuk hidupnya secara umum sudah dapat terlaksana kearah yang positif. Maka, aspek politik dalam pemberdayaan masyarakat miskin dikatakan bahwa KPM mampu untuk tepat mengambil keputusan jangka panjang.

### **3.1.3 Aspek Psikologis**

Aspek psikologis mengandalkan potensi individu yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk dapat menunjukkan perilaku dan rasa percaya diri. Rasa percaya diri timbul ketika seseorang tidak merasa rendah di lingkungannya. Tujuan bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tujuannya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang. Bebasnya KPM dari kemiskinan menimbulkan rasa percaya diri sehingga mereka dapat beradaptasi dengan kehidupannya, dari aspek sosial dan aspek politik. Dalam prosesnya, KPM menerima BPNT mendapat perlindungan dari segala bentuk diskriminasi agar tidak tertindas. Perlindungan berarti melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari penindasan oleh kelompok kuat, menghindari persaingan tidak seimbang (terutama tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah eksploitasi yang lemah oleh yang kuat. Pemberdayaan harus bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi terhadap kelompok yang kurang beruntung, sehingga KPM lebih percaya diri. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki tugas yaitu melaksanakan pendekatan pemberdayaan untuk melindungi masyarakat miskin agar tidak tertindas oleh kelompok yang lebih kuat. Upaya ini dilakukan agar aspek psikologis kekuatan rumah tangga dapat terwujud.

## **3.2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

### **3.2.1 Banyaknya Perubahan Kebijakan Dari Kementerian Sosial**

Suatu kebijakan diputuskan dengan matang agar suatu program serta kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kebijakan ditetapkan bukan semata-mata sebagai pedoman dalam menjalankan program serta kegiatan, tetapi agar dalam pelaksanaannya tetap berjalan secara terstruktur dan terarah. Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan program BPNT melaksanakan program tersebut sesuai dengan kebijakan yang ada. Seiring berjalannya waktu, di masa pandemi virus covid-19 pemerintah pusat khususnya Kementerian Sosial selalu mengeluarkan kebijakan dan arahan baru sehingga pelaksanaan di lapangan terhambat. Kebijakan yang dibuat demi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, akan tetapi kenyataannya di lapangan masih kurang efektif. Hasil Wawancara dengan Loly selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada 03 Januari 2022, mengatakan:

“Namun, karena ini program pemerintah pusat progres dilapangan itu terkadang pemerintah pusat itu suka membuat kebijakan tersendiri. Contoh, didalam petunjuk pelaksanaannya, pengelolaannya, panduannya itu tidak boleh ditransaksikan dengan barang lain selain yang tadi. Tapi, pada kenyataannya, Kementerian Sosial, 2021 kemarin mengatakan boleh dibelanjakan apa saja makanya kita pusing dengan program bansos ini.”

Dari pernyataan tersebut, peneliti melihat bahwa kebijakan yang berubah-ubah dapat menghambat dari segi transaksi di E-Warong, sehingga ketika kebijakan ini sah maka E-Warong yang menjual kebutuhan pangan hingga kebutuhan yang beragam memiliki posisi menguntungkan dibandingkan dengan E-Warong lainnya atau E-Warong agen mendapat posisi menguntungkan dibanding E-Warong KUBE. Sehingga, posisi ini menghambat proses pemberdayaan yaitu akibat dari kebijakan

yang berubah, tingkat penjualan dari E-Warong KUBE menurun yang menyebabkan pendapatan bagi pengelola E-Warong yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi rendah.

### **3.2.2 Masih Adanya Ketidaksesuaian Data Penduduk Miskin Yang Ada Di DTKS Dengan Penerima Manfaat**

DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga. Data dari DTKS juga merupakan syarat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mendapat bantuan sosial yang salah satunya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sistem pendataan ini bersifat online, sehingga jika terdapat ketidaksesuaian data yang terjadi dapat menyebabkan tidak tepat sasaran penerima. Penargetan penerima program yang tidak tepat akan membuat program menjadi sia-sia, karena efek program tidak ditujukan kepada rumah tangga yang sangat membutuhkan atau kurang mampu, dan akan menimbulkan kecemburuan masyarakat. Ketepatan program harus ditingkatkan, karena masih ada rumah tangga yang secara finansial lebih kuat dari rumah tangga miskin lainnya tetapi menerima manfaat program, dan beberapa rumah tangga justru diluar zona kemiskinan tetapi tetap menerima manfaat program. Hal ini tidak hanya menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang benar-benar miskin, tetapi juga menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Hal ini masih terjadi di Kota Tanjungpinang kepada masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa masih adanya sasaran penerima bantuan yang tidak sesuai dalam arti seseorang sudah ternilai mampu tetapi masih mendapatkan bantuan tetapi masyarakat yang masih merasa kurang sejahtera tidak menerima bantuan bahkan kadang yang awalnya menerima bantuan tetapi malah terbuang dari daftar penerima. Wawancara yang dilakukan dengan Alifah sebagai Koordinator Daerah BPNT pada tanggal 04 Januari 2022, ia mengatakan:

“Dari sekian banyak bantuan sosial yang ada, BPNT merupakan salah satu program yang memiliki cukup banyak masalah. Masalah yang sangat sering terjadi dan dinilai menghambat itu seperti sasaran yang tidak tepat dalam pemberian bantuan khususnya BPNT. Hal ini menjadi perhatian kami dan meminta KPM untuk tidak ikut campur dan biarkan kami yang menangani.”

Dapat diambil kesimpulan dari wawancara tersebut bahwa masih adanya kendala dari pusat yakni data DTKS yang tidak sesuai sehingga menghambat proses pemberian bantuan dan menghambat terealisasi tujuan pemberdayaan yaitu kekuatan rumah tangga. Banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran ini menjadi pembicaraan di masyarakat, khususnya pada kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masyarakat selalu mengeluh dengan pendataan yang kurang valid dan meragukan sistem yang digunakan oleh pemerintah. Sehingga, peneliti turun kepada E-Warong dan bertemu KPM. Wawancara yang saya lakukan dengan Ramila selaku KPM pada 14 Januari 2022, mengatakan:

“Memang kadang susah mau kasih tahu sama orang-orang ya KPM ini karena kami kadang sudah sampaikan ke TKSK dan masih ada juga orang sering tidak ada namanya maksudnya tidak menerima bantuan lagi kami juga cuman bisa menyampaikan kalau semua ini tidak bisa cepat dan kami juga tidak bisa bantu lebih.”

Seperti yang dikatakan oleh KPM tersebut, kurangnya informasi dan komunikasi dari pihak pemerintah dan kepada KPM sehingga KPM tidak dapat mempersiapkan diri, ketika mereka tidak dapat bantuan segala kebutuhan pokok harus dibeli dengan uang sendiri dan hal ini sangat

memberatkan mereka yang seharusnya menerima bantuan. Kecemburuan dan segala macam pembicaraan negatif juga muncul sehingga menciptakan lingkungan yang tidak kondusif dan meregangkan hubungan sosial mereka.

### **3.3. Upaya Mengatasi Hambatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

#### **3.3.1 Peningkatan Koordinasi Antara Dinas Sosial Dengan TKSK dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**

Berdasarkan hambatan yang terjadi yaitu terkait dengan perubahan kebijakan yang kerap terjadi, pihak yang berperan penting adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial menerima perintah dari Kementerian Sosial terkait beberapa perubahan teknis pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kemudian diteruskan kepada koordinator daerah, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan pihak pengelola E-Warong untuk dilaksanakan serta disampaikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Peneliti menemukan bahwa ketika adanya perubahan kebijakan, kurangnya koordinasi sehingga TKSK harus menginformasikan lagi kepada pihak E-Warong dan KPM. Upaya yang dilakukan dari Dinas Sosial adalah ikut turun ke lapangan dalam hal ini ke kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang untuk mensosialisasikan terkait perubahan yang terjadi. Adapun upaya dari TKSK yaitu mengarahkan KPM untuk sebisanya berbelanja di E-Warong KUBE dalam rangka membantu sesama KPM untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Hal ini dilakukan agar membantu satu sama lain sesama KPM dengan unsur pemberdayaan. Tetapi, semua kembali kepada KPM untuk berbelanja dimana saja karena kondisi kebutuhan yang beragam mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) juga kerap berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait keluhan dari KPM dan membahasnya sehingga program tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Maka, upaya yang dilakukan dari pihak Dinas Sosial bersama TKSK agar dapat meningkatkan koordinasi bersama dan membantu KPM untuk mensejahterakan dirinya dan rumah tangganya.

#### **3.3.2 Pengaduan Online Pada Website Kementerian Sosial Terkait DTKS Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Data-data penerima bantuan harus tetap dipantau guna mempertimbangkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tidak tepatnya sasaran penerima bantuan. Tidak tepatnya sasaran penerima menjadi hal yang masih dibahas dalam program bantuan khususnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sehingga, upaya yang dilakukan juga harus lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian (Penting wajib ada sub bab ini: berisi perbandingan antara temuan penelitian anda dengan temuan penelitian sebelumnya)**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang terdapat diatas, ada 3 (tiga) yang membahas tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari perspektif yang berbeda. Penelitian Agus Wiyaka, Endang Murti (2018) menyimpulkan dari sisi implementasi pelaksanaan Program BPNT yang melihat bagaimana berjalannya program BPNT dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan serta melihat secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap program tersebut. Selanjutnya penelitian Anisa Rahma Dini, Yunisca Nurmalisa, Abdul Halim (2018) menyimpulkan dari sisi efektivitas Program BPNT menggunakan metode kuantitatif dengan mengukur indikator-indikator

tertentu terkait program tersebut. Terakhir, penelitian Diah Mukminatul Hasimi (2020) yang menyimpulkan implementasi Program BPNT dengan melihat indikator yang tercapai dalam program tersebut.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Sejauh peneliti ketahui, bahwa belum ada yang meneliti tentang pemberdayaan masyarakat miskin dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), padahal perlunya pemberdayaan yang merupakan salah satu fungsi pemerintah terkhususnya pemberdayaan masyarakat miskin. Maka, ini menjadi alasan penelitian ini dilakukan.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian serta pengamatan yang penulis lakukan pada pelaksanaan penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Tanjungpinang, penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan rumah tangga yang merupakan sumber utama pemberdayaan, melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat dikatakan berhasil memberdayakan masyarakat yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dimana, hal ini dapat dilihat dari tiga aspek kekuatan rumah tangga, yaitu:
  - a. Aspek Sosial  
Terpenuhinya akses produksi tertentu yaitu kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dominannya beras dan mereka merasa terbantu dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut sehingga hasil bantuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka hingga sebulan. Dengan mereka mendapatkan bantuan tersebut, hingga saat ini tidak ada perbedaan antara KPM dan masyarakat lainnya yang cenderung mampu sehingga tidak ada kesenjangan dan hubungan sosial mereka tetap terjaga, dengan demikian KPM juga dapat turut aktif dalam organisasi sosial di masyarakat, seperti karang taruna.
  - b. Aspek Politik  
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mampu mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan individu maupun rumah tangganya, seperti pengambilan beasiswa untuk anaknya oleh KPM sehingga mereka tidak mengeluarkan biaya untuk menjalankan pendidikan tinggi anaknya. Selain itu, KPM juga mampu mengambil keputusan terhadap pengeluaran dan pengelolaan keuangan rumah tangga, seperti ketika tidak mendapat bantuan lagi, KPM mampu mengambil keputusan terhadap pengeluaran untuk rumah tangganya dan tetap menjalankan kehidupannya sebagaimana mestinya.
  - c. Aspek Psikologis  
Pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Tanjungpinang bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) telah berhasil melaksanakan perlindungan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pemahaman pendekatan perlindungan kepada masyarakat yakni KPM agar tidak adanya diskriminasi dan kesenjangan kepada sesama KPM atau masyarakat lain sehingga seorang KPM dapat menunjukkan perilaku dan rasa percaya diri.
2. Faktor penghambat pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terdiri dari 2 faktor penghambat, yaitu:

a. Banyaknya Perubahan Kebijakan Dari Kementerian Sosial

Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan program BPNT melaksanakan program tersebut sesuai dengan kebijakan yang ada. Seiring berjalannya waktu, di masa pandemi virus covid-19 pemerintah pusat khususnya Kementerian Sosial selalu mengeluarkan kebijakan dan arahan baru sehingga pelaksanaan di lapangan terhambat. Kebijakan yang dibuat demi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, akan tetapi kenyataannya di lapangan masih kurang efektif. Sehingga, hal ini menghambat pelaksanaan pemberdayaan.

b. Masih Adanya Ketidakesesuaian Data Penduduk Miskin Yang Ada Di DTKS Dengan Penerima Manfaat

Masih adanya kendala dari pusat yakni data DTKS yang tidak sesuai sehingga menghambat proses pemberian bantuan dan menghambat terealisasi tujuan pemberdayaan yaitu kekuatan rumah tangga. Banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran ini menjadi pembicaraan di masyarakat, khususnya pada kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masyarakat selalu mengeluh dengan pendataan yang kurang valid dan meragukan sistem yang digunakan oleh pemerintah.

3. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, adapun upaya untuk mengatasinya dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yakni:

a. Peningkatan Koordinasi Antara Dinas Sosial Dengan TKSK dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Upaya yang dilakukan dari Dinas Sosial adalah ikut turun ke lapangan dalam hal ini ke kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang untuk mensosialisasikan terkait perubahan kebijakan yang terjadi. Adapun upaya dari TKSK yaitu mengarahkan KPM untuk sebisanya berbelanja di E-Warong KUBE dalam rangka membantu sesama KPM untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) juga kerap berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait keluhan dari KPM dan membahasnya sehingga program tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

b. Pengaduan Online Pada Website Kementerian Sosial Terkait DTKS Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Upaya terkait tidak tepatnya sasaran penerima bantuan dapat dilaporkan kepada website Kementerian Sosial langsung yang dimana program bantuan sosial merupakan program pemerintah pusat langsung dan diturunkan kepada daerah-daerah.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar Pemerintah Kota Tanjungpinang sebaiknya lebih memperhatikan ketepatan data masyarakat miskin agar dapat memaksimalkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU/JURNAL

- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA
- Damsar (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dariyatno, Dkk. (2009), *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dini, A. R., Nurmalisa, Y. dan Halim, A. 2018. 'Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik'. *Jurnal Kultur Demokrasi* 5 (13): 1-12
- Eko, S. (2005), *Pemberdayaan Kaum Marginal*. Yogyakarta: APMD Press
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca
- Hasimi, D. M. 2018. 'Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam'. *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1 (1): 61-72
- Nain, U. (2017), *Relasi Pemerintah Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Nain, U. 2018. 'Transformasi Lumbung Desa: Evaluasi Program Raskin dan Rastra di Kabupaten Bulukumba'. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 5 (1): 85-104
- Priyono, O. S. dan Pranarka, A. M. W. (1996), *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS
- Rasyid, R. (2007). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya
- Soekanto, S. dan Sulistyowati, Budi (2013), *Sosiologi Suatu Pengantar*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sujarweni, Wiratna V. (2019), *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PUTSAKABARUPRESS
- Supriyanto, T. (2014). *Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani Desa Mandiri Pangan Di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali*. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret

Usman, S. (2004), *Politik Pangan*. Yogyakarta: CIREd

Wiyaka, A. dan Murti, E 2019. 'Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perlindungan Sosial Di Kecamatan Gerih dan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2018'. Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF) 3 (1): 1773 - 1778

Yohanes, F. (ed.) (2003), *Jaminan Sosial Bagi Warga Tidak Mampu*. Jakarta: Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri Lingkup Menko Kesra

## **B. SUMBER LAIN**

Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 2

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id/publikasi.html>